

mahkamah

www.mahkamahnews.org | @mahkamahnews | BPPM Mahkamah

Dalam setahun ke depan, civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) akan menyambut gedung baru.

Sumber gambar: pexels.com

SEMUA KARENA GEDUNG BARU

Proses pembangunannya memang belum dimulai, tetapi hal itu sudah membuat was-was para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM). Kabarnya, untuk membangun gedung baru, pihak fakultas harus memindahkan *sekre* KMFH, PMK, Majestic-55, BPPM Mahkamah, dan musala. Bahkan, tahun ini hingga beberapa waktu ke depan, mahasiswa FH UGM harus kehilangan kantin dan tempat fotokopi. Semuanya dilakukan demi gedung baru setinggi tujuh lantai.

Dekan FH UGM saat ini, Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M., mengatakan bahwa pembangunan gedung ini menghabiskan biaya dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bagi universitas. Gedung yang akan dibangun nantinya digunakan untuk keperluan administrasi dan kegiatan akademik. Harapannya, gedung ini akan menjadikan tata ruang di FH UGM lebih baik.

”Sebenarnya, selama pembangunan gedung tersebut, kebermanfaatannya itu sudah dikaji secara komprehensif. Misal, fungsi dan gunanya untuk apa saja dan selama itu sudah memenuhi standar tata kelola ruang, *nggak* masalah. Tinggal bagaimana kualitas *grand design* bangunannya untuk kebutuhan fakultas hukum,” jelas Amrullah menanggapi rencana pembangunan FH UGM.

Ketua Keluarga Muslim Fakultas Hukum (KMFH) ini menambahkan bahwa gedung terdampak akan dilelang pada Maret hingga April. Pelelangan tersebut segera dilakukan apabila

proses kesepakatan antara dekanat dan mahasiswa lancar.

Berdasarkan penuturan Sigit, *sekre* Lembaga Semi Otonom (LSO) terkait dan musala akan direlokasi sementara ke Gedung VII lantai 1. Kegiatan akademik yang telah dijadwalkan di sana akan dipindahkan ke lantai 2. Apabila masih belum mencukupi, pihak dekanat akan bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UGM untuk membantu kegiatan perkuliahan mahasiswa FH UGM. Sedangkan, kantin akan tutup karena kontraknya telah berakhir.

Polemik lainnya yang muncul yaitu mengenai tempat fotokopi yang akan ditiadakan karena kontraknya akan segera berakhir. Saat diwawancarai, Dekan FH UGM periode 2016-2021 merasa tempat fotokopi tidak terlalu penting dalam kegiatan akademik. Menurutnya, mahasiswa jangan terlalu bergantung dengan tempat fotokopi karena teknologi sudah canggih.

Dosen yang aktif dalam berbagai organisasi internasional ini mengungkapkan apabila mahasiswa menganggap penting tempat fotokopi, pihak dekanat menyarankan mahasiswa tersebut memfotokopi ke Fakultas Filsafat, Fisipol atau yang lainnya.

“

Mahasiswa jangan terlalu bergantung dengan tempat fotokopi karena teknologi sudah canggih

Matheus Lumbanraja, Ketua Keluarga Mahasiswa Katolik (KMK), berpendapat bahwa tempat fotokopi itu penting untuk kegiatan perkuliahannya. Apabila pihak dekanat menyarankan seperti itu, ia masih ragu apakah pelayanannya sama seperti tempat fotokopi FH

UGM yang materi perkuliahannya lengkap dan mudah didapatkan.

Hal senada juga disampaikan Risro Subiacto, Ketua Persatuan Mahasiswa Kristen (PMK). Ia tidak setuju apabila tempat fotokopi 'lenyap'. Hal tersebut dikarenakan tempat fotokopi FH UGM selain murah dan lengkap, materi kuliah dari dosen bisa didapatkan di sana dengan mudah. Ketiadaan kantin rupanya tak menjadi masalah baginya, karena ia masih bisa makan di luar kampus.

Meski pembangunan gedung baru belum dilaksanakan, pro dan kontra sudah bertebaran dikalangan mahasiswa. Namun, siapa *sih* yang tidak ingin gedung kampus FH UGM saat ini dipermak agar terlihat lebih segar? **(Sancho)**

PEMBANGUNAN FH

POLEMIK PEMBANGUNAN

Audiensi pembangunan Fakultas Hukum (FH UGM) telah dilaksanakan pada Jumat (24/2) di Ruang Sidang 3.

Audiensi dihadiri oleh tenaga kependidikan FH UGM yang diwakili Urip Sudiyono, Damari Pranowo, dan Sulistyo Widodo. Hadir pula ketua dan wakil ketua Dewan Mahasiswa Justicia (DEMA Justicia), ketua Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK), ketua Keluarga Mahasiswa Katolik (KMK), ketua Keluarga Muslim Fakultas Hukum (KMFH), ketua Majestic-55, dan ketua Badan Penerbitan Pers Mahasiswa Mahkamah (BPPM Mahkamah). Serta Agustina Merdekawati, wakil dari Tim Sekretariat Pelaksana Kegiatan (TSPK) Perencanaan Pembangunan Gedung Sayap Barat FH UGM.

Ada empat hal yang didiskusikan dalam pertemuan ini, yaitu: 1) Pemindahan sekretariat (sekre) Lembaga Semi-Otonom (LSO) yang akan dirobohkan (KMFH, PMK, KMK, Majestic-55, dan BPPM Mahkamah), 2) pemindahan musala, 3) ruang penyimpanan arsip-arsip dari gedung 1, serta 4) pengadaan kantin dan fotokopian.

Konsep pemindahan LSO terdampak dan pembentukan gudang sebagai tempat arsip menjadi bahasan utama audiensi itu. Dua konsep yang saling bertentangan pun ditawarkan oleh pihak tenaga kependidikan FH UGM dan DEMA Justicia.

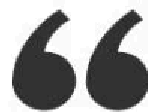
Urip, Kepala Kantor Administrasi FH UGM, memberikan penawaran bahwa garasi dapat digunakan sebagai pengganti sekre sementara. Namun, garasi yang dimaksud adalah garasi yang telah di-*upgrade* kelayakannya. Hal itu agar LSO terdampak tetap bisa melaksanakan aktifitasnya dengan kondusif. Lalu, mengenai gudang arsip, Urip berencana untuk membangun ruangan semi-permanen diantara gedung 1 dan gedung 7 FH UGM. Pembangunan dengan menggunakan konsep ini diperkirakan menghabiskan dana sekitar 40-100 juta rupiah.

Konsep dari DEMA Justicia dipresentasikan oleh Givari Maulana, Wakil Bidang Pergerakan. Konsep tersebut menempatkan ruang 713, 714, dan 716 sebagai pengganti sekre. Ruangan ini akan dibangun sekat dan pintu tambahan sehingga satu ruangan dapat digunakan oleh dua LSO. Lalu, arsip-arsip gedung 1 akan dipindahkan ke ruang 711 dan 712. Mengenai ruang pengganti untuk jadwal-jadwal perkuliahan yang ada di sana, mahasiswa telah memindahkannya ke ruangan lain yang kosong. Sehingga, jadwal tersebut tidak mengubah hari dan jam, melainkan ruangannya saja. Konsep ini diperkirakan akan memakan biaya

lebih murah dibandingkan dengan konsep pertama karena tidak perlu membangun ruangan baru. Selain itu, lahan di depan gedung 7 masih dapat digunakan sebagai tempat parkir.

Givari menambahkan bahwa keamanan mahasiswa akan terancam apabila masih menggunakan gedung 7. Hal ini karena Ia mengestimasikan akan ada *crane* yang memiliki panjang 50 meter dan radiusnya dapat membahayakan orang-orang disekitar pembangunan. Dengan berkurangnya pengguna kelas di gedung 7 maka akan mengurangi jumlah mobilisasi mahasiswa di daerah bahaya tersebut.

Namun, konsep Lembaga Otonom yang merupakan representasi dari mahasiswa FH UGM ini mendapat kritik tajam dari pihak tenaga kependidikan. Mereka mengatakan bahwa konsep ini tidak meng-*cover* beberapa hal. "Yang dilihat dari konsep ini hanya jadwal kuliah, tidak melihat jadwal ekstra," jelas Damari selaku Kepala Seksi Akademik dan Kemahasiswaan. Ia mengatakan bahwa ruangan di gedung 7 itu sudah penuh untuk Latihan Pendidikan dan Kemahiran Hukum (PLKH). Ruang tersebut juga diperlukan untuk latihan kompetisi peradilan semu dan acara-acara lainnya. Ia menambahkan bahwa ruangan-ruangan itu merupakan alternatif bagi dosen-dosen yang sudah tidak begitu kuat fisiknya untuk menaiki tangga.



Konsep pemindahan LSO terdampak dan pembentukan gudang sebagai tempat arsip menjadi bahasan utama audiensi

Urip juga mengkritisi bahwa anggaran yang digunakan untuk merenovasi ruangan di gedung 7 lantai 1 FH UGM justru

akan memakan biaya lebih besar. Ini karena ruangan tersebut harus dikembalikan fungsinya setelah pembangunan selesai. Sehingga, perlu biaya tambahan untuk merobohkan sekat-sekat dan pintu pembatas sekre. Selain itu, ruang kelas tidak akan dijadikan gudang karena dikhawatirkan akan merusak ruang tersebut.

"Pas nanti adek-adek PLKH, itu yang akan kena adek-adek semua. Nanti, adek-adek akan merasakan tidak ada ruang," tambah Urip. Namun, Ia tidak memaksakan untuk menggunakan konsep garasi.

Estu Kresnha, Ketua DEMA Justicia, mengatakan bahwa Ruang Jurnal Mimbar Hukum serta Ruang Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dijadikan alternatif untuk latihan PLKH dan lainnya.

Diakhir diskusi, Agustina Merdekawati yang akrab dipanggil Eka menyimpulkan beberapa hal, yaitu 1) Belum ada kesepakatan



Suasana Audiensi pembangunan Fakultas Hukum (FH UGM) yang dilangsungkan pada Jumat, 24 Februari 2017 di Ruang Sidang 3. (Sumber foto: OA LiNE DEMA JUSTICIA)

terkait ruang pengganti sekre LSO terdampak dan ruang peletakan arsip, 2) musala akan dipindahkan ke selasar gedung 1 dimana akan dibangun ruang yang pantas untuk ibadah, dan 3) pengadaan kantin dan fotokopian tidak dapat dilakukan karena keterbatasan lahan.

Ia juga menjelaskan bahwa pihak fakultas akan mengadakan audiensi dengan seluruh mahasiswa terkait sekre dan gudang arsip nantinya. Hal tersebut agar dapat mewakili suara mahasiswa yang tidak tergabung dalam organisasi. Namun, keputusan final ada pada Sigit Riyanto selaku Dekan FH UGM. **(Fitri)**

SEMARAK DIES NATALIS

"Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) ke-71 ini tidaklah semeriah perayaan tahun lalu, saya juga kurang tahu mengapa. Hal ini mungkin sudah menjadi tradisi Dies Natalis, apabila angka bulat, maka perayaannya lebih meriah, contohnya waktu ke-65 ngundang Iwan Fals, ke-50 dan ke-25 juga meriah", ujar Damar Satrio Yudanto selaku salah satu panitia dari pihak mahasiswa.

Rangkaian acara Dies Natalis FH UGM ke-71 telah dimulai sejak Jumat, 10 Februari 2017. Senam bersama ialah agenda yang dilaksanakan sebagai awal rangkaian Dies Natalis FH UGM. Selanjutnya, acara Sepeda Gembira *Family Gathering* yang diikuti oleh dosen, karyawan beserta keluarga. Setelah itu, tabur bunga silaturahmi yang dilaksanakan pada 16 Februari lalu.

Esoknya, Prof. Dr. Sigit Riyanto, SH., LL.M., dekan FH UGM, membacakan Laporan Dekan pada Rapat Senat Terbuka di Gedung I FH UGM. Acara kemudian dilanjutkan dengan orasi ilmiah oleh Prof. Dr. Maria S.W Sumardjono, S.H., M.CL., M.PA. dengan judul "Pluralisme Hukum Dalam Pengaturan Sumberdaya Alam di Indonesia, Adaptasi, Harmonisasi, dan Agenda ke Depan".

Tanggal 18 Februari menjadi puncak perayaan Dies Natalis. Pada hari itu, Keluarga Alumni Hukum Gadjah Mada (Kahgama) secara resmi dibentuk. "Mulai sekarang, kita membentuk ikatan alumni yang khusus untuk FH. Tapi, sebenarnya untuk ikatan yang per angkatan sudah ada, jadi ini supaya lebih kuat lagi, maka dibuatlah Kahgama," tutur Laras

Susanti, S.H.,LL.M., dosen yang juga merupakan alumni FH UGM ini.

"Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ke-71 ini tidaklah semeriah perayaan tahun lalu, saya juga kurang tahu mengapa. Hal ini mungkin sudah menjadi tradisi Dies Natalis, apabila angka bulat, maka perayaannya lebih meriah, contohnya waktu ke-65 *ngundang* Iwan Fals ke-50 dan yang ke-25 juga meriah," ujar Damar Satrio Yudanto selaku salah satu panitia dari pihak mahasiswa. Hal tersebut terbukti dengan penyanyi Katon Bagaskara yang turut meramaikan perayaan tahun lalu.

"Perayaan kali ini sudah melingkupi *yah*, soalnya ada yang sifatnya akademis dan menghibur. Jadi, menurut Saya, oke, *lah* jika dibandingkan dengan perayaan ke-70, apresiasi dari civitas FH UGM sendiri lebih terlihat. Tahun lalu *kan* kita mengundang tamu dari luar, padahal jika dilihat sekarang dari diri kita sendiri saja ternyata banyak sekali bakat yang bisa ditunjukkan," ungkap Laras ketika diminta membandingkan antara perayaan ke-70 dan ke-71.



Prof. Dr. Eddy O. S. Hiariej, S.H.,M.Hum. menutup acara dengan menyanyikan dua buah lagu, yakni "Hymn for The Weekend" dan "Sky Full of Stars"

Malam puncak perayaan Dies Natalis ke-71 sepenuhnya diisi oleh civitas akademika FH UGM. Tak hanya mahasiswa, para dosen pun ikut beraksi. Prof. M. Hawin, S.H., LL.M, Ph.D. membawakan tembang "Dekat di Hati". Prof. Dr.Eddy O. S.Hiariej, S.H.,M. Hum. menutup acara dengan menyanyikan dua buah lagu, yakni "*Hymn for The Weekend*" dan"*Sky Full of Stars*".

Banyak doa dan harapan ditujukan untuk FH UGM kedepannya. "Saya berharap FH

UGM semakin terdepan. Tidak hanya bicara soal bagaimana dia sebagai fakultas yang meraih capaian-capaian dalam bidang pengetahuan, penulisan, publikasi. Tapi, juga tanggung jawab moralnya kepada masyarakat, yaitu memberikan solusi dan berkontribusi aktif dalam masalah-masalah di Indonesia," jelas Laras.

Harapan lainnya disampaikan oleh Damar, "FH UGM itu memiliki ciri khasnya sendiri, dia untuk teori dan asas-asanya kita mantap. Guru-guru besar kita juga menurut saya luar biasa, yah tetaplah menjadi jati diri yang memiliki asas dan teori yang kuat untuk bisa menjawab tantangan hukum di Indonesia ini," pungkasnya **(Evasolina, Ade Wulan)**

DIES NATALIS FH UGM

SEBUAH REFLEKSI

Februari ini merupakan bulan yang spesial, terpampang jelas acara tahunan Dies Natalis di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM).

Tema Dies Natalis tahun ini pasti membuat orang gemetar ketika mendengarnya. Bagaimana tidak? Tema "*Accelerating to be Great faculty of Law*" itu telah menandakan ambisi dan tekad FH UGM kedepannya. Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah sudah pantaskah kita menjadi Fakultas Hukum berkelas dunia yang sudah kita dengungkan?

Hal pertama yang bisa kita kritik adalah birokrasi kampus. Tentu, syarat menuju *World Class Law Faculty* membutuhkan birokrasi yang mudah, cepat, efisien, dan sesuai standar internasional. Memang, dalam hal birokrasi, FH UGM belum bisa dibilang mencukupi. Wawancara dengan banyak kepala lembaga otonom dan semi otonom di FH UGM menunjukan bahwa dalam hal memakai ruangan saja, perizinannya masih berbelit. Sebagai contoh, setiap gedung di FH UGM memiliki mekanisme peminjamannya sendiri-sendiri. Gedung I akan berbeda prosedur peminjaman dengan Gedung IV, begitu pula dengan gedung lainnya. Birokrasi perizinan dalam melakukan riset juga masih berbelit. Memang masalah ini harus dilihat dari berbagai sudut pandang, tetapi apakah kita pantas menyandang *World Class Law Faculty* jika birokrasi dalam kampus masih belum mumpuni?

Kedua, yang akan dikritik oleh penulis adalah masalah transparansi penilaian. Secara sistematika memang sudah diberi tahu di setiap kuliah perdana, bagaimana tata cara dan porsi penilaian. Yaitu, gabungan nilai tugas, Ulangan Tengah Semester (UTS) dan Ulangan Akhir Semester (UAS). Tetapi, untuk transparansi penilaian masih sangat kurang. Pada akhir semester hanya diumumkan hasil akhir dari setiap akumulasi nilai. Disini penulis merasa kurang puas jika hanya diberitahu akumulasi nilainya saja. Menurut penulis, perlu adanya keterangan akumulasi nilai lebih lanjut, supaya jelas dan transparan bagaimana dosen

> **“**
>
> **Apakah sudah tepat langkah-langkah untuk menjadi *Word Class Law Faculty*? Apakah cukup kemampuan internal kampus FH UGM menuju *World Class Law Faculty?***

menilai ujian mahasiswa. Selain itu, terdapat perbedaan dari cara–cara dosen menilai. Walaupun sistematikanya sama, tetapi setiap dosen memiliki prinsip penilaiannya sendiri-sendiri. Hal ini turut mempengaruhi pemilihan dan penilaian mahasiswa terhadap dosennya. Menunjukkan bahwa tidak ada standar yang jelas dari kalangan dosen untuk penilaian mahasiswa itu sendiri.

Hal terakhir yang belum dirasa cukup adalah tidak ada kesamaan penanaman nilai (*transfer of value)* dari dosen kepada mahasiswa. Hampir sama dengan penilaian yang berbeda beda dari tiap dosen. Belum ada standar jelas *transfer of value* yang diberikan. Memang, setiap dosen memiliki cara dan gaya mengajar yang berbeda-beda. Tetapi, dalam anggapan penulis perlu adanya (setidaknya) kesamaan *transfer of value* yang jelas kepada seluruh mahasiswa. Yaitu, kesamaan nilai moral dan etis yang ditanamkan. Hal ini dilakukan karena dalam ranah profesi hukum, sangat rawan penyelewengan hukum yang akan memberikan dampak besar kepada publik. Maka, kesamaan *transfer of value* menjadi sangat penting bagi para mahasiswa.

Ketiga hal ini yang perlu kita refleksikan bersama sebelum kita menyongsong *World Class Law Faculty*. Sudah siapkah Sumber Daya Manusia (SDM) FH UGM menjawab tantangan ini? Apakah sudah tepat langkah-langkah untuk menjadi *Word Class Law Faculty?* Apakah cukup kemampuan internal kampus FH UGM menuju *World Class Law Faculty?* **(Abi Bhaskara)**